### BAB I

### PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. SPIP merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;

2. Keandalan laporan keuangan;

3. Pengamanan aset; serta

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### Dasar Hukum

* + 1. Undang‐undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara.
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah.
		3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

### Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatikadalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

### Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan‐kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika.Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2019.

### BAB II

### RUANG LINGKUP

### SEKILAS TENTANG SPIP

### Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari‐hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

### Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan.

### Unsur‐unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur‐unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

### Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Lingkungan Pengendalian terdapat 6 (enam) Sub Unsur yang terdiri dari :

* + 1. Sub Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika,
		2. Sub Unsur Komitmen terhadap kompetensi,
		3. Sub unsurKepemimpinan yang kondusif,
		4. Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan,
		5. Sub Unsur Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat,
		6. Sub Unsur Kebijakan dan Praktik pembinaan SDM,
		7. Sub Unsur Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

### Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati‐hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

### Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar untuk mencapai tujuan‐tujuan pengendalian yang telahditetapkan.

Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sekurang‐kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

1. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
2. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
4. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
5. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

### Informasi dan Komunikasi

Penerapan unsur Informasi dan Komunikasi dalam Instansi Pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung‐jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung‐jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

### Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitaskinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu.Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan‐perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

**Bab III**

**TATA CARA / MEKANISME**

### Mengidentifikasi, Menganalisis Risiko

### Mengidentifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko‐risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko‐risiko dimaksud meliputi risiko yang telah teridentifikasi apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Beberapa cara yang digunakan dalam kajian ini adalah :

* + - 1. Kajian Dokumen

Kajian dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memahami tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi :

* + - * + Peraturan Bupati Karanganyar No. 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
				+ Renstra
				+ Renja
			1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data resiko yang sebanyak-banyaknya. Data resiko dapat diperoleh melalui :

* + - * + Dokumen hasil pemeriksaan oleh Inspektorat
				+ Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK
	1. **Menganalisis Risiko**

Tujuan dari tahapan ini adalah mengetahui level/tingkatan risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya resiko dan dampak yang yang dihasilkan dari terjadinya resiko tersebut. Analisis risiko dilakukan untuk menentukan probabilitas atau seberapa sering timbulnya risiko dan seberapa besar pengaruh dampak negatifnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

1. **Tindakan Pengendalian**
2. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

### Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur‐unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar diperoleh gambaran sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Unsur** | **Bukti Pendukung / Rujukan** |
| 1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | Surat Teguran / Sanksi |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Pengiriman peserta Diklat |
| 3 | Kepemimpinan yang Kondusif | Renja SKPD |
| 4 | Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Peraturan Bupati Karanganyar No. 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. |
| 5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | Disposisi Surat |
| 6 | Kebijakan dan Praktik pembinaan SDM | Workshop, Bintek |
| 7 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait. | Rapat Koordinasi |

### Mengenali, Mengevaluasi Dan Mengidentifikasi Celah Pengendalian Yang Terpasang

Mengenali pengendalian adalah mendokumentasi apa yang telah di buat (ada/terpasang), sedangkan mengevaluasi adalah menilai apakah pengedalian yang telah dibuat tersebut telah efektif atau kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan.

Celah pengendalian adalah kondisi dimana pengedalian yang ada tidak mencukupi/tidak efektif untuk mengendalikan resiko atau memang belom ada pengendalian untuk mengendalikan resiko. Ada 4 (empat) kemungkinan celah yang terindentifikasi :

1. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
2. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan e prosedur baku.
3. Pengendalian belum ada namun tidak sesuai dengan peraturan diatasama sekali maka perlu dibuat/susun pengendalian terkait.
4. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namum belum dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENETAPAN KONTEKS

Untuk meningkatkan efektifitas penanganan risiko diperlukan identifikasi resiko. Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko ke dalam delapan kelompok risiko yaitu:

1) Konteks strategis,

adalah tataran identifikasi risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.

2) Konteks sumber daya manusia,

adalah tataran identifikasi risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar meliputi: ketersediaan dan kompetensi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyarserta hubungan antar pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyarmaupun di luar unit.

3) Konteks keuangan,

adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

4) Konteks sarana dan prasarana,

adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

5) Konteks program dan pelaporan,

adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama seperti SIM-DA, e-monev di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, dan ketertiban pelaporan.

6) Konteks sistem dan prosedur,

adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur seperti prosedur kenaikan pangkat, dan prosedur pengawasan

BAB V

IDENTIFIKASI RESIKO

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko‐risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Dari hasil penilaian resiko Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Risiko Teridentifikasi

Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Karanganyar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Konteks Resiko | Bidang |
| Sekretariat | Bidang Informasi Komunikasi Publik | Bidang Tata Kelola Informatika |
| 1. | Konteks strategis, |  |  |  |
| 2. | Konteks sumber daya manusia |  |  |  |
| 3 | Konteks keuangan, |  |  |  |
| 4 | Konteks sarana dan prasarana |  |  |  |
| 5 | Konteks program dan pelaporan |  |  |  |
| 6 | Konteks sistem dan prosedur |  |  |  |

BAB VI

HASIL ANALISIS RESIKO

### Kegiatan Pengendalian yang MasihDibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar‐benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut.

* + 1. Pemetaan Irigasi (saluran irigasi tersier maupun irigasi air tanah dalam).
		2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).
		3. Penderasan Penyuluhan tentang pentingnya Penggunaan Pupuk Organik.
		4. Uji Kompetensi Petugas (POPT).

### INFORMASI DANKOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

* Sosialisasi tatap muka, *website*, pembuatan buku saku, *booklet*, dan *banner* tentang Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.
* Sosialisasi tatap muka, *website*, pembuatan buku saku, *booklet*, dan *banner* tentang penggunaan pupuk sesuai anjuran dan penggunaan pupuk organik.
* Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatanSDM.

### PEMANTAUAN DANEVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakanmeliputi: (1) Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing‐masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian; dan evaluasi terpisah, Inspektorat Kabupaten Karanganyar melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit‐unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

### PENUTUP

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.